

## Implementasi Lingkungan Belajar yang Inklusif sebagai Wujud Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi

Fina Riswari<sup>1</sup>, Neny Yuniarti<sup>1</sup>, Ediyanto<sup>1\*</sup>, Asep Sunandar<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

\*Penulis koresponden

**Ediyanto**

[ediyanto.fip@um.ac.id](mailto:ediyanto.fip@um.ac.id)

### Abstract

The realization of an inclusive learning environment at the tertiary level is carried out by providing a comfortable learning environment and acceptance from all parties for the presence of students in the campus environment. This study aims to examine the implementation of an inclusive learning environment as a manifestation of inclusive education in one of the universities in Malang City. The research method is qualitative, using a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by semi-structured individual interviews and observation activities at the research location. Based on the research, the results show that: (1) the implementation of an inclusive and comfortable learning environment for persons with disabilities has put forward the concept of universal design although it is not perfect; (2) there are opportunities for persons with disabilities to get access to higher education properly; (3) the spirit of building collaboration from both students with disabilities and non-disabled students in creating an inclusive learning environment.

### Keywords

Learning Environment; Inclusive Education; Higher Education

### Abstrak

Perwujudan lingkungan belajar yang inklusif pada jenjang perguruan tinggi dilakukan dengan memberi layanan lingkungan belajar yang nyaman dan penerimaan dari semua pihak atas kehadiran mahasiswa di lingkungan kampus. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi lingkungan belajar inklusif sebagai perwujudan pendidikan inklusif di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Metode penelitian adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara individu semi terstruktur dan kegiatan observasi pada lokasi riset. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa: (1) implementasi lingkungan belajar yang inklusif dan nyaman bagi penyandang disabilitas telah mengedepankan konsep universal design meskipun belum sempurna; (2) adanya peluang bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi secara layak; (3) semangat untuk membangun kolaborasi baik dari mahasiswa penyandang disabilitas maupun mahasiswa yang bukan disabilitas dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

### Kata kunci

Lingkungan Belajar; Pendidikan Inklusi; Pendidikan Tinggi

## PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 1. Amanat tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas, dimana mereka berhak untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan seperti warga negara Indonesia lainnya. Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pendidikan sampai di jenjang perguruan tinggi. Hal ini di perkuat oleh peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi dan bagaimana lembaga penyelenggara Pendidikan tinggi dalam menyediakan lingkungan, sarana dan sistem layanan yang sesuai dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Pada tahun 2017 UNESCO menyatakan bahwa pendidikan tinggi yang berkualitas harus berupaya mempromosikan budaya inklusi. Agar hal ini dapat terjadi dengan tepat maka penting untuk menghargai dan menghormati keberagaman

© 2022 Ediyanto

**Cara mengutip:** Riswari, F., Yuniarti, N., Ediyanto, E., & Sunandar, A. (2022). Implementasi Lingkungan Belajar yang Inklusif sebagai Wujud Pendidikan Inklusi di Perguruan Tinggi. *Ilmu Pendidikan: Jurnal Kajian Teori dan Praktik Kependidikan*, 6(2), 85-92. <http://dx.doi.org/10.17977/um027v6i22022p085>

kebutuhan, pengalaman belajar dan kebutuhan masing masing mahasiswa sebagai individu sehingga diharapkan dapat mewujudkannya lingkungan belajar yang inklusif.

Fakta di lapangan sampai saat ini, masih banyak kendala atau belum terpenuhinya hak penyandang disabilitas untuk mengakses layanan pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini bisa dilihat mulai dari akses untuk masuk ke perguruan tinggi dan perjuangan mahasiswa disabilitas yang sudah diterima untuk mendapat layanan yang tepat dan non diskriminatif, dalam hal sarana dan prasarana misalnya, bangunan dan sarana yang belum aksesibel, kurikulum dan strategi pembelajaran yang diterapkan oleh dosen belum sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mahasiswa disabilitas, serta lingkungan sosial kampus yang belum ramah dan sebagainya.

Studi kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi lingkungan belajar yang inklusif sebagai perwujudan pendidikan inklusif di salah satu perguruan tinggi di kota Malang, melalui kegiatan riset dalam bentuk wawancara individu semi terstruktur dengan salah satu staff pengajar, mahasiswa serta alumni yang pernah menempuh pendidikan di universitas tersebut. Aspek yang diteliti adalah lingkungan belajar yang inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan tinggi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Fakultas Pendidikan pada salah satu universitas di Kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara individu semi terstruktur dan kegiatan observasi pada lokasi riset. Adapun narasumber pertama dalam kegiatan wawancara ini adalah Ketua Sub Unit Pelayanan dan Pengembangan Disabilitas sekaligus sebagai staff pengajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, narasumber kedua merupakan mahasiswa pascasarjana Pendidikan Khusus, serta narasumber ketiga adalah alumni mahasiswa penyandang disabilitas dari Jurusan Pendidikan Luar Biasa sekaligus saat ini beliau sedang menyelesaikan studi pascasarjana Pendidikan Khusus. Narasumber yang diwawancarai ditanyai tiga pertanyaan utama dan diminta untuk menguraikannya secara rinci mengenai : 1) Lingkungan belajar yang nyaman, 2) Penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas, dan 3) Semua mahasiswa dapat belajar dari aspek akademik dan aspek sosial dengan baik. Ketiga pertanyaan ini mengacu pada lingkungan belajar yang diterima oleh semua kalangan pada jenjang pendidikan tinggi, yang mana penerimaan lingkungan yang dapat diterima oleh semua kalangan sebagai indikator implementasi lingkungan belajar yang inklusif sebagai salah satu perwujudan pendidikan inklusif di perguruan tinggi.

Kegiatan observasi dilakukan dengan menggunakan metode observasi partisipan, dimana kegiatan observasi ini melibatkan peneliti secara langsung untuk meninjau dan mengamati lingkungan kampus terutama di FIP serta membandingkan dengan hasil wawancara sebelumnya. Triangulasi antara hasil wawancara dan observasi dilakukan untuk menunjang keabsahan kajian studi.

## **HASIL**

### **Lingkungan belajar inklusi yang dapat diterima**

Dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi lingkungan belajar yang nyaman merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan, termasuk juga menyediakan lingkungan yang dapat diterima oleh semua kalangan baik itu mahasiswa penyandang disabilitas maupun yang bukan penyandang disabilitas hal ini juga sebagai salah satu bentuk implementasi dari konsep universal design baik dari aspek sarana prasarana, proses pembelajaran maupun dalam proses penerimaan mahasiswanya. Ketiga narasumber menyepakati dalam hal penyediaan sarana prasarana bahwa pihak penyelenggaraan pendidikan inklusi saat ini secara bertahap telah membenahi dan melengkapi sarana prasarana agar mampu mendukung aksesibilitas dan mobilitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas maupun bagi kalangan yang bukan disabilitas dengan mengusung konsep universal design, memang ada beberapa sarana yang kurang mendukung dalam mobilitas para mahasiswa penyandang disabilitas misalnya saja ram bagi bagi penyandang disabilitas tuna daksa yang masih terbatas, tangga yang masih ada terlalu curam bagi penyandang tuna netra, maupun track khusus bagi penyandang tuna netra jika akan melakukan mobilisasi dari satu gedung ke gedung yang lain diluar area fakultas ilmu pendidikan, hal hal demikian perlu diupayakan untuk membuat lingkungan belajar inklusif menjadi nyaman bagi penyandang disabilitas dengan tetap mengedepankan konsep universal design. Hasil penyimpulan kegiatan wawancara terhadap para narasumber dari pertanyaan pertama adalah bahwa salah satu upaya yang sudah dilakukan sebagai wujud pemenuhan lingkungan belajar yang inklusif adalah dengan : 1) membentuk sub pusat layanan pengembangan dan pelayanan mahasiswa disabilitas oleh institusi, 2) pemenuhan hak akan para penyandang disabilitas dalam konteks compulsory of education, 3) memastikan para mahasiswa penyandang disabilitas mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya

dalam kerangka kerja reasonable accommodation yang artinya dalam pemenuhan kebutuhannya sesuai dengan resources yang dimiliki oleh institusi, 4) memberikan advokasi kepada pihak fakultas untuk menyediakan sarana prasarana dalam membantu mobilitas para penyandang disabilitas, 5) menciptakan komunikasi secara aktif dengan komunitas non PLB untuk membentuk aware of disability sehingga mampu membuka peluang dalam mengembangkan diri bagi para penyandang disabilitas, 6) membentuk kegiatan pendampingan bagi para mahasiswa disabilitas yang dibentuk secara swadaya oleh mahasiswa jurusan, 7) dalam menentukan sebuah kebijakan, institusi hendaknya melibatkan peran dari para mahasiswa penyandang disabilitas agar sebuah kebijakan tersebut mampu mengakomodasi secara berimbang.

### **Penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas**

Setelah narasumber menjawab pertanyaan pertama, selanjutnya narasumber memberikan pemahaman mengenai pertanyaan kedua mengenai bagaimana proses penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas pada institusi yang menjadi kajian studi kami. Dalam proses penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas. Dari hasil wawancara dengan salah satu narasumber untuk mekanisme penerimaan mahasiswa menyatakan bahwa:

*“ketika kita memasuki PT itu kita harus mengikuti mekanisme yang ada dari kampus tsb, itu klo menurut saya ya bu, jd ketika ada kuota khusus itu akan eeee gmn ya mempermudah tapi itu akan menjadi eee resiko tersendiri artinya apa ketika itu beresiko dari lulusan slb, dari lulusan sekolah inklusi lulusan sma reguler ini kan memiliki berlatar belakang yang berbeda sedangkan dari teman2 slb ketika masuk didalam PT dan eee individu blm bisa menyesuaikan diri itu juga akan menjadi beban secara psikis makanya kenapa saya mengatakan eee klo ada jalur khusus ini akan eee membuat resiko krn kalau menurut saya ketika kamu mau masuk PT ya sudah kamu harus bersaing dengan teman teman non disabilitas tapi saya juga mengapresiasi dengan Institusi ini bahwa ada jalur prestasi, disinilah saatnya disabilitas itu menunjukkan potensi dan kemampuan kita, terbukti juga sih bu dari adik2 kita banyak yg berprestasi dari angkatan saya sendiri 2013 ada 4 yg 3 jalur prestasi saya jalur mandiri, 3 kali saya nyoba itu. Itu akan berdampak jangka panjang ya bu...saat kita membuat suatu penelitian eksperimen coba dibandingkan dengan kampus sebelah itu juga sangat2 signifikan perbedaannya.”*

Apa perbedaannya ?

*“Eeee terutama pertama dari individu disabilitas itu sendiri contoh nih dikasih kuota disabilitas wah gampang masuk ke kampus itu ada jalurnya khusus ini kan menjadi prioritas bukan kesempatan yang diutamakan tapi hanya semacam menggugurkan uu no.8 tentang disabilitas, jadi menurut saya lebih ke kesempatan ketika kesempatan ini diberikan disabilitas ini bisa bersaing gak nah itu sudah dibuktikan di Institusi ini.”*

Pernyataan ini pun diamini oleh salah satu narasumber dan juga beliau sebagai kepala dari sub unit pusat pengembangan dan pelayanan disabilitas bahwa dalam mekanisme penerimaan mahasiswa di institusi ini berada pada lembaga lain diluar jurusan, sehingga proses penerimaan mahasiswa yang berlangsung juga dipastikan sama dengan mahasiswa reguler lainnya yaitu jalur tes dan jalur prestasi. Meskipun belum ada akses khusus untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut bagi penyandang disabilitas namun hal ini mengidentifikasi bahwa institusi tersebut sudah membuka peluang bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi secara layak dan setara dengan mahasiswa lainnya.

Apakah ada kriteria khusus dalam penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas?

*“Tidak, jadi scr tidak langsung Institusi juga apa ya eee dadakan semua ketika diketahui mahasiswa baru klo dari plb kan sdh lumrah ya bu tp ketika ada mahasiswa disabilitas tuli diterima di FIK itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi staff pengajarnya disana ...pasti mikirnya gini “kog sampai kecolongan ya” hal hal spt ini lo bu yang harus kita edukasi tapi bagaimana dari disabilitas ini juga bisa menyesuaikan kurikulum di pt juga sebaliknya staff pengajar juga bisa membantu memahami karakteristik dr ragam disabilitas yg ada”.*

Simpulan yang bisa dihasilkan dari wawancara ini adalah :1) institusi sudah membuka peluang bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, 2) perlunya screening bagi mahasiswa penyandang disabilitas dalam mekanisme penerimaan mahasiswa, 3) memberikan advokasi terhadap jurusan lain diluar jurusan pendidikan luar biasa mengenai kebutuhan dan karakteristik mahasiswa penyandang disabilitas terutama dalam proses perkuliahan.

*Semua mahasiswa dapat belajar dari aspek akademik dan aspek sosial dengan baik*

Kajian studi dari aspek akademik tidak terlepas bagaimana proses pembelajaran/perkuliahan berlangsung, bagaimana proses perkuliahan yang dapat di akomodir oleh mahasiswa penyandang disabilitas dan bagaimana dampaknya bagi mahasiswa lain. Sehingga aspek ini juga memiliki efek domino dalam perkembangan aspek sosial bagi mahasiswa penyandang disabilitas maupun mahasiswa yang bukan disabilitas. Kita ambil contoh dari pengembangan kurikulum misalnya, ketiga narasumber menyepakati bahwa tidak adanya penyesuaian kurikulum pada jenjang pendidikan tinggi, hal ini merupakan konsekuensi dari pilihan masing masing individu disabilitas selama proses perkuliahan, seperti disampaikan oleh narasumber bahwa:

*“Tidak ada penyesuaian kurikulum, ketika kamu sdh jd mahasiswa maka kamu harus mengikuti kegiatan perkuliahan secara penuh namun dengan tetap mempertimbangkan karakteristik mahasiswa. Namun penugasan yang diberikan juga masih tetap sama dengan mahasiswa reguler lainnya. Setiap dosen itu mempunyai ciri dalam pembelajaran namun lbh ke hasilnya daripada prosesnya.”*

*“Ini yang harus dipahami begini, kalau ada seorang mahasiswa jurusan pendidikan kan harus memenuhi persyaratan2 untuk lulus sebagai sarjana pendidikan dan ini akan digunakan untuk menjabat sebagai guru sbg pendidik dan ini yg sy sebut berbeda dengan compulsory of education. Klo disekolah khusus bisa jadi standarnya diturunkan/ disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter siswa sedangkan kalau di PT tentu tdk bisa krn hal ini berkaitan dgn profesi tertentu, kesarjanaan dan jabatan tertentu. itu yg tdk bisa dipukul rata, bgmn pendidikan inklusif in higher education”*

Bahkan salah satu narasumber menggambarkan kolaborasi antara mahasiswa reguler dengan mahasiswa penyandang disabilitas dalam mengatasi hambatan selama proses perkuliahan berlangsung sehingga secara tidak langsung hal ini dapat mempengaruhi perkembangan aspek sosial dalam menyediakan lingkungan belajar yang inklusif yang dapat diterima oleh semua kalangan.

*“untuk kurikulumnya mengikuti mahasiswa lainnya bu, karena kebanyakan yang masuk univ adalah abk yang tdk memiliki hambatan intelektual (dengan proses masuk juga mengikuti tes seperti yang lainnya). tetapi dalam pengajaran dosen biasanya memberikan fasilitas kepada mahasiswa disabilitas tersebut apabila mahasiswa ada kesulitan dalam proses perkuliahan salah satunya adanya pendampingan dari teman-teman gempita ataupun teman kelasnya”*

Hal hal positif yang dibangun oleh komunitas sebagai wujud dalam menciptakan lingkungan yang inklusif yang dapat memberikan rasa nyaman bagi para mahasiswa selama proses perkuliahan berlangsung. Hal ini mampu mengembangkan aspek sosial darai masing masing individu yang mana mereka mengembangkan kolaborasi yang saling menguntungkan dalam mengatasi hambatan yang ditemui saat perkuliahan berlangsung. Adapun kendala yang selama proses perkuliahan berlangsung seperti yang disampaikan oleh salah satu sumber antara lain:

*“beberapa mahasiswa tunarungu kesulitan dalam menangkap materi dosen jika tanpa adanya pendamping atau tulisan, sehingga mahasiswa kurang mandiri, terkadang ada miskom terkait tugas yg diberikan. Untuk mahasiswa tunanetra, tdk semua buku atau materi perkuliahan berupa braille ataupun elektronik, sehingga mereka membutuhkan orang lain untuk membacakannya. Untuk mahasiswa tunadaksa memerlukan orang lain untuk mobilitas berpindah tempat karena belum semua tempat ataupun gedung aksesibel untuk disabilitas yg menggunakan kursi roda”*

Dari hal ini dapat disimpulkan antara lain :1) pentingnya membangun kolaborasi untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat diterima oleh semua pihak, 2) mahasiswa penyandang disabilitas memiliki kesempatan, kuantitas kerja, dan target penugasan yang sama dengan mahasiswa reguler lainnya, 3) kesetaraan dalam proses perkuliahan berlangsung dengan baik dalam konteks praktik inklusif dibidang akademis.

## PEMBAHASAN

Pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan pendidikan inklusif di jenjang perguruan tinggi menjadi sebuah keharusan dalam memenuhi compulsory of education, salah satunya dengan bentuk penyesuaian yang efektif dilakukan untuk memastikan praktik inklusif dibidang akademis (Dias & Soares, 2018). Selain itu langkah efektif yang bisa dilakukan oleh penyelenggara pendidikan inklusi adalah menyediakan platform bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengekspresikan kebutuhan mereka, yang sangat penting dalam mengatasi praktik kebijakan yang ada di institusi yang lebih tinggi, dan juga dapat membantu merancang kebijakan inklusif yang dapat diakses oleh mahasiswa penyandang disabilitas (Tugli et al., 2016). Penyediaan platform ini bisa dijadikan sebagai langkah awal untuk menuju pendidikan yang inklusif salah satunya dengan menyediakan Sub Unit Pengembangan dan Pelayanan Disabilitas pada institusi yang menjadi studi kajian memiliki peran penting untuk memastikan inklusi dan strategi mahasiswa penyandang disabilitas mencapai pendekatan terpadu (Metropolis (FOTIM), 2011) melalui 4 tema rekomendasi yang dipaparkan antara lain : 1) Inklusivitas dalam pendidikan tinggi, 2) Demografi siswa dan mendefinisikan kelompok target, 3) Unit Disabilitas di lembaga tersier, 4) Akses dan desain universal. Hal tersebut sudah dilakukan oleh institusi yang menjadi kajian studi ini, memang masih belum sepenuhnya namun upaya yang dilakukan sudah mulai tampak dalam proses perwujudan reasonable accommodation hal ini tertuang dalam pernyataan narasumber antara lain:

*“tentang akomodasi yang layak itu ada tahapannya , pemenuhannya dilakukan dilakukan secara bertahap artinya emm didalam pp ada sanksi, sanksi itu diberikan ketika memang eee apa fasilitasi sudah dilakukan dan yang wajib melakukan fasilitasi adalah pemerintah, itu yang harus dipahami oleh masyarakat ....krn itu pemenuhannya lingkungan yang inklusif bagi mahasiswa penyandang disabilitas juga bertahap yang artinya harus punya strategi dan punya tanggung jawab untuk memenuhi itu iya namun juga harus memperhitungkan juga kemampuannya.”*

Memaksimalkan peran lingkungan yang inklusif di lembaga pendidikan tinggi melalui kegiatan rekonstruksi sebagai konteks dimana “demokrasi pengetahuan” terjadi (Skelton, 2002) dengan merancang program perkuliahan bagi mahasiswa penyandang disabilitas yang memberikan prioritas kebutuhan dan memiliki peluang yang sama untuk mencapai kemajuan (Haigh, 2002) namun dengan kualitas, kuantitas serta target penugasan yang sama dengan mahasiswa lainnya. Byra (2006) dalam (Moriña, 2020) mengungkapkan bahwa melalui pendekatan pedagogi inklusif memberikan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa untuk mencapai kesuksesan, ide dari pendekatan ini memungkinkan bahwa setiap orang dapat belajar dibawah kondisi yang tepat termasuk para penyandang disabilitas di jenjang pendidikan tinggi sehingga lingkungan belajar inklusif dapat terwujud. Sehingga hal ini menjadikannya sebagai prioritas yang lebih besar harus diberikan kepada mahasiswa penyandang disabilitas dalam hal mendefinisikan kebutuhan mereka, menyediakan sumber daya yang cukup, dan memberdayakan institusi pendidikan tinggi untuk menempatkan dimensi ini pada agenda pemerataan mereka (Salmi & D’Addio, 2021). Upaya upaya yang sudah dilakukan oleh institusi merupakan salah satu bentuk akomodasi yang dikembangkan dalam memfasilitasi para penyandang disabilitas dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Bentuk akomodasi lain untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif di jenjang pendidikan tinggi adalah melalui mekanisme penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas, dalam studi kajian ini ditemukan bahwa tidak ada kriteria khusus dalam penerimaan mahasiswa penyandang disabilitas yang artinya dapat disimpulkan bahwa semua mahasiswa memiliki kesempatan dan kesetaraan dalam proses penerimaan mahasiswa. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan para narasumber antara lain:

*“yg saya tahu dalam implementasinya anak2 disabilitas yg akan masuk UM melalui tahapan tes yang sama seperti teman2 yg lain”*

*“tidak ada jalur khusus untuk disabilitas krn...krn apa ketika kita memasuki PT itu kita hrs mengikuti mekanisme yang ada dr kampus tsb”*

*“poin utamanya adalah bagaimana ketika ada mahasiswa penyandang disabilitas yg*

*memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh institusi termasuk syarat admin, seleksi, biaya, dsb mereka dapat diterima sebagai mahasiswa ..... kecuali dapat beasiswa”*

Ketika proses penerimaan mahasiswa berlangsung di institusi ini ada lembaga khusus yang memiliki wewenang dalam proses penerimaannya, beberapa persyaratan yang ditentukan oleh institusi akan dieksekusi oleh lembaga ini. Sehingga perlu adanya screening mahasiswa bagi calon mahasiswa penyandang disabilitas yang mendaftar agar kebutuhan akan layanan pendidikan yang sesuai dapat direalisasikan dengan tepat, kita ambil saja contoh yang di sampaikan oleh salah satu narasumber:

*“penerimaan mahasiswa baru klo mengambil jurusan plb kan sdh lumrah ya bu tp ketika ada mahasiswa disabilitas tuli diterima di FIK itu kan menjadi tantangan tersendiri bagi dosen dosen disana ....pasti mikirnya gini “kog sampai kecolongan ya”*

*“ Saya juga mengetahui di Institusi ini tidak hanya jurusan PLB yang menerima mahasiswa berkebutuhan khusus, yang pernah saya tahu di FIK juga ada anak tunarungu yang menjadi mahasiswa di fakultas tersebut, kemudian pada program Probis juga ada beberapa mahasiswa tunarungu disana, dan di jurusan PLS juga terdapat mahasiswa Autis (kebetulan seangkatan dengan saya)”*

*“Harus..harus...dan itu mestinya dr panitia penerimaan mahasiswa baru ada semacam labeling bahwasana peserta untuk sbmptn sekitar eeee 20 mahasiswa yang ikut tes, la nanti dari ini brp yang keterima la dr itu hrs ada data”*

Pernyataan diatas menjadi penting untuk dipertimbangkan dimana kebutuhan akan screening bagi mahasiswa penyandang disabilitas sebagai salah satu bentuk akomodasi yang dapat di persiapkan dan diantisipasi oleh lembaga penyelenggara pendidikan untuk menentukan program layanan yang tepat dan sesuai bagi mahasiswa penyandang disabilitas, tidak masalah mahasiswa tersebut mengambil jurusan yang diinginkan namun seyogjanya tetap memperhatikan berbagai bentuk akomodasi yang mencakup penyediaan sumberdaya, dukungan penyesuaian, dan penyesuaian antisipasif yang harus diberikan oleh lembaga pendidikan tinggi dan ketrampilan belajar serta ketrampilan kemandirian yang harus dapat ditindak lanjuti (Hewett et al., 2017). Hal ini penting dilakukan karena memiliki relevansi khusus dengan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi untuk membantu menyiapkan model yang tepat dalam membantu menginterpretasikan pengalaman belajar bagi mahasiswa penyandang disabilitas pada lingkungan yang inklusif, hal ini juga dapat mendukung mahasiswa disabilitas dalam mempertimbangkan cara terbaik untuk mempersiapkan kehidupan setelah lulus dari jenjang pendidikan tinggi. Sehingga memungkinkan mahasiswa dapat berkembang secara professional dan dapat bekerja di tempat kerja yang inklusif yang dapat menghargai dan menerima lulusan penyandang disabilitas (Ayse Collins & Fara Azmat , Ruth Rentschler, 2018).

Pembahasan topik selanjutnya adalah mengenai semua mahasiswa dapat belajar dari aspek akademik dan aspek sosial dengan baik, adalah dengan meminimalkan hambatan inklusi yang harus diatasi oleh pihak penyelenggara pendidikan tinggi dan dengan menerapkan strategi yang tepat yang memungkinkan mereka maju ke arah budaya, kebijakan, dan praktik universitas yang lebih inklusif (Márquez & Aguilar, 2020). Pentingnya mengatasi hambatan yang tampak merupakan salah satu langkah praktis yang bisa dilakukan untuk menciptakan dan membina komunitas akademik yang inklusif sehingga dapat dipahami peran komunitas dalam membentuk perubahan sosial dan bagaimana langkah praktis tersebut dapat mempengaruhi norma sosial dalam institusi akademik sehingga terwujudnya lingkungan belajar yang inklusif. Dalam kajian ini adanya komunitas yang membantu dan memastikan proses kegiatan akademik dapat berjalan dengan lancar melalui kegiatan advokasi dan pendampingan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Bentuk komunitas ini adalah unit kegiatan mahasiswa yang berfokus pada penyediaan layanan yang dibentuk untuk membantu mahasiswa penyandang disabilitas agar dapat mengikuti proses belajar/perkuliahannya secara maksimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber:

*“UKM itu Unit kegiatan mahasiswa bu, jadi kegiatan mahasiswa yg terdiri dari bermacam2 organisasi mahasiswa. Untuk UKM Gempita ini (merupakan organisasi kegiatan mahasiswa yg berfokus terhadap disabilitas, mulai dari layanan pendampingan, pengajaran braille/isyarat kpd mahasiswa2 yg ingin belajar terkait disabilitas dll”*

Selanjutnya institusi mengembangkan proses pembelajaran/perkuliahannya yang dapat diterima semua kalangan sebagai upaya dalam menyelenggarakan proses belajar yang mengusung konsep universal design for learning. Konsep UDL ini mengakomodasi perbedaan belajar dan kebutuhan individu dalam proses pembelajaran (Veer et al., 2021). Konsep ini sangat relevan dengan mempromosikan budaya inklusi dalam mewujudkan lingkungan belajar inklusif yang disesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing individu, dimana budaya inklusi menghormati dan menghargai pengalaman belajar dari masing-masing individu sehingga diharapkan semua mahasiswa dapat belajar bersama mahasiswa lain dengan nyaman sebagai implementasi lingkungan belajar yang inklusif.

## SIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan dalam menganalisis implementasi lingkungan belajar yang inklusif pada salah satu perguruan tinggi di Kota Malang diketahui bahwa penyelenggaraan lingkungan belajar yang inklusif dan nyaman bagi penyandang disabilitas yang sudah dilakukan berjalan dengan cukup baik dan segala hambatan yang ada telah diminimalisir baik dari institusi maupun secara swadaya yang dalam hal ini melibatkan peran serta dari unit kegiatan mahasiswa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi lingkungan belajar yang inklusif sebagai wujud pendidikan inklusi di perguruan tinggi dapat dicapai melalui: (1) menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan menyediakan lingkungan belajar yang dapat diterima oleh semua kalangan baik itu mahasiswa penyandang disabilitas maupun yang bukan penyandang disabilitas dengan menerapkan konsep universal design; (2) membuka peluang bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi secara layak dan menyediakan platform bagi mahasiswa penyandang disabilitas untuk mengekspresikan kebutuhan mereka; (3) meminimalkan hambatan inklusi yang harus diatasi oleh pihak penyelenggara pendidikan tinggi dengan menerapkan strategi yang tepat yang memungkinkan mereka maju ke arah kebijakan dan praktik universitas yang lebih inklusif.

Saran peneliti agar implementasi lingkungan belajar yang inklusif sebagai wujud pendidikan inklusi di perguruan tinggi lebih berpihak pada penyandang disabilitas, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) perlunya kebijakan atau peraturan khusus untuk mahasiswa penyandang disabilitas yang ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi tentang penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan; (2) Pengembangan Sub Unit Pelayanan dan Pengembangan Disabilitas menjadi Pusat studi dan Layanan Disabilitas (PLSD) untuk pendampingan dan advokasi tentang kepentingan dan kebutuhan mahasiswa penyandang disabilitas di lingkungan kampus; (3) Mempromosikan kepada seluruh stakeholder tentang kesetaraan hak dalam pendidikan

## DAFTAR RUJUKAN

- Ayse Collins, & Fara Azmat, Ruth Rentschler. (2018). 'Bringing everyone on the same journey': Revisiting inclusion in higher education: *Studies in Higher Education: Vol 44, No 8*. Taylor & Francois. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2018.1450852?src=recsys>
- Dias, D., & Soares, D. (2018). Civic learning outcomes: A step towards an inclusive higher education. *International Journal of Inclusive Education*, 22(4), 360–374. <https://doi.org/10.1080/13603116.2017.1365956>
- Haigh, M. J. (2002). Internationalisation of the Curriculum: Designing inclusive education for a small world. *Journal of Geography in Higher Education*, 26(1), 49–66. <https://doi.org/10.1080/03098260120110368>
- Hewett, R., Douglas, G., McLinden, M., & Keil, S. (2017). Developing an inclusive learning environment for students with visual impairment in higher education: Progressive mutual accommodation and learner experiences in the United Kingdom. *European Journal of Special Needs Education*, 32(1), 89–109. <https://doi.org/10.1080/08856257.2016.1254971>
- Márquez, C., & Aguilar, N. M. (2020). Advancing towards inclusion: Recommendations from faculty members of Spanish universities. *International Journal of Inclusive Education*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1858977>
- Metropolis (FOTIM), F. of T. I. of the N. (2011). *Disability in higher education: Project report*. University of the Witwatersrand Pretoria.
- Moriña, A. (2020). Faculty members who engage in inclusive pedagogy: Methodological and affective strategies for teaching. *Teaching in Higher Education*, 0(0), 1–16. <https://doi.org/10.1080/13562517.2020.1724938>
- Salmi, J., & D'Addio, A. (2021). Policies for achieving inclusion in higher education. *Policy Reviews in Higher Education*, 5(1), 47–72. <https://doi.org/10.1080/23322969.2020.1835529>

- Skelton, A. (2002). Towards Inclusive Learning Environments in Higher Education? Reflections on a Professional Development Course for University Lecturers. *Teaching in Higher Education*, 7(2), 193–214. <https://doi.org/10.1080/13562510220124213>
- Tugli, A. K., Mokonoto, M., Ramakuela, N. J., & Netshikweta, L. M. (2016). Inclusive Policy and Service Needs Survey among Students with Disabilities in an Institution of Higher Education. *International Journal of Educational Sciences*, 14(1–2), 7–12. <https://doi.org/10.1080/09751122.2016.11890473>
- Veer, E., Zahrai, K., & Stevens, S. (2021). I stood by: The role of allies in developing an inclusive and supportive academic environment post #MeToo. *Journal of Marketing Management*, 37(1–2), 162–179. <https://doi.org/10.1080/0267257X.2020.1772344>